

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lahirnya Sistem Adminitrasi Informasi Desa berawal tahun 2009, Combine Resource Institution (CRI) merancang suatu program Sistem informasi Desa (SID), untuk memulihkan kembali kehidupan desa dengan Profile Desa yang masih belum tertata secara rinci untuk menampung keunikan dari data sebuah desadan juga untuk menunjang peningkatan kelengkapan data desa. Sebagai bahan pengambilan data secara bersama-sama dan demokratis, sekaligus mendorong terbangunnya kontrol publik yang efektif terhadap penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa.

Melalui pengembangan sistem informasi dan teknologi berbasis masyarakat (Ranggoaini Jahja, dkk, 2012). Selama tahun 2009-2010 program Sistem Informasi Desa(SID) berkembang baik, hal ini dibuktikan pada bulan Oktober 2012 Sistem Informasi Desa telah dipraktikkan di 16 desa wilayah DIY, 73 desa di Jawa Tengah, 1 desa di Jawa Barat, 1 desa di Jawa Timur, dan 1 desa di Nusa Tenggara Timur. Melihat keberhasilan Sistem Informasi Desa yang telah melahirkan pengetahuan untuk mendorong pembaharuan dan kemajuan demokrasi saat ini khususnya di desa.

Kemudian khusus untuk Indonesia bagian timur (Sulawesi Tenggara,Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)Sistem Informasi Desa diperkenalkan dengan nama Sistem Administrasi dan Informasi Desa /Kelurahan(SAID/K). Adapun yang mendorong lahirnya SAID/K yaitu:

1. Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital. Tidak lain langkah yang ditempuh dengan memindahkan dari data kertas menjadi format digital yang tersimpan dalam komputer.
2. Adanya kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data-data lainnya secara cepat dan tepat.
3. Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (open source) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa.
4. Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak(pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu.

Pemerintah dalam setiap programnya selama ini selalumenganggarkan banyak program-program penanggulangan kemiskinan. Ada program PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan masih banyak lagi. Semua ini dilakukan karena pada kenyataan yang ada di masyarakat masih banyak rakyat miskin yang perlu diberikan penguatan agar terbebas dari belenggu kemiskinan.

Mekanisme penyajian data pembangunan di suatu desa, hendaknya disajikan secara transparan, akuntabel dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini, semula pemerintah daerah Kabupaten Kota di wilayah Indonesia mengembangkan sistem profil desa yang memuat seluruh potensi desa yang ada di wilayah desa masing-masing.

Namun, demikian dalam perkembangannya sistem profil desa yang dimaksud tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi desa yakni SAID (Sistem Administrasi Informasi Desa). SAID merupakan sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam pendokumentasian data milik desa yang memiliki manfaat untuk mempermudah proses pencarian data desa.

Dalam rangka menjamin transparansi realisasi pembangunan di tingkat desa serta untuk meningkatkan partisipasi publik, pihak Pemerintah Kabupaten menyiapkan Sistem Administrasi Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) yang bisa diunduh melalui android. Sebelumnya SAID/K hanya bisa diunduh pada kalangan birokrat dan pejabat pemerintah desa.

Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur telah menyiapkan aplikasi mutakhir bernama Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID/K). SAID/K diharapkan dapat menjadi formula untuk memecahkan masalah kompleks yang terjadi di desa. Usia kerja produktif yang dimiliki desa bisa dapat diberdayakan dengan maksimal.

Hal itu dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat Bondowoso turut serta berpartisipasi mensukseskan program pemerintah itu. Dengan dukungan masyarakat sehingga dapat memberikan penyadaran bagi warga guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kominfo, tahun 2018 sudah mengerjakan 163 desa untuk pembuatan website desa dan sudah bisa diakses oleh warga. Tahun ini, Kominfo menargetkan semua 209 desa dan 10 kelurahan di Bondowoso sudah menggunakan aplikasi SAID/K (Sistem Administrasi Informasi Desa/Kelurahan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan, sudah dilaksanakannya SAID/K di beberapa desa di wilayah kerja kabupaten bondowoso perlu kita lihat bagaimana pengembangan SAID di desa sudah terlaksana sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) atau tidak..

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya membangun sistem administrasi dan informasi desa, maka hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan di atas untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :  
“Bagaimana Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) sebagai wujud keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bondowoso?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengembangan SAID/K dalam menjawab keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bondowoso.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang Ilmu Pemerintahan mengenai pengembangan SAID/K dalam menjawab keterbukaan informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upaya mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan untuk keterbukaan informasi publik. Manfaat lainnya, yaitu dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

